

Pengembangan Model Pembudayaan Nilai-Moral dalam Pendidikan Dasar di Indonesia: Studi Kasus di Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 1 Kota Malang, Jawa Timur

ABSTRAK

Kajian terhadap model pembudayaan nilai-moral di lingkungan pendidikan dan pengembangan model alternatif hipotetik perlu dilakukan agar menjadi acuan bagi pemegang kebijakan, praktisi pendidikan, dan stakeholder pendidikan dalam melakukan pembudayaan nilai-moral di lingkungan sekolah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitik untuk studi kasus. Data dikumpulkan dengan teknik observasi, wawancara, studi dokumentasi, dan studi pustaka. Sumber data utama adalah kata-kata dan tindakan warga sekolah SD (Sekolah Dasar) Negeri Bandungrejosari I di Kota Malang, Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model pembudayaan nilai-moral dapat dikembangkan melalui tiga pendekatan, yaitu: (1) Pengintegrasian nilai-moral pada mata pelajaran; (2) Melalui penataan suasana sekolah, baik unsur fisik maupun non fisik sehingga nilai-moral kondusif untuk diimplementasikan di sekolah; dan (3) Melalui program ekstrakurikuler seperti pramuka, drum band, dan bela diri. Adapun "core value" model realitas sekolah ini adalah Ar-Rahman dengan 11 nilai rinciannya seperti: ketakwaan, keamanan, ketertiban, keindahan, kebersihan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, keterbukaan, keteladanan, dan kewirausahaan, yang dikemas dengan istilah 11 K.

Kata-kata kunci: Pengembangan model, pendidikan nilai-moral, peserta didik, nilai-nilai Pancasila, dan warganegara yang baik.

PENGANTAR

Baik secara historis konstitusional maupun kurikuler, pendidikan nilai-moral sudah menjadi bagian integral pendidikan nasional di Indonesia. Namun dalam kehidupan sehari-hari terdapat sejumlah ketimpangan sosial dan moral, baik di tataran pejabat publik, pemerintahan, masyarakat umum, bahkan dalam kehidupan pelajar atau mahasiswa yang mengindikasikan belum berhasilnya pendidikan nilai moral secara memuaskan. Dengan demikian, sangat penting dan mendesak untuk melakukan kajian terhadap pola pembinaan nilai-moral

Dr. H. Kama Abdul Hakam adalah Dosen Jurusan Pendidikan Umum FPIPS Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Jalan Dr. Setiabudhi No.229 Bandung 40154, Jawa Barat, Indonesia. Beliau boleh dihubungi dengan alamat e-mail: kama.hakam@yahoo.com

yang dilakukan oleh masing-masing lembaga pendidikan, baik kajian tentang interaksi pembelajaran di dalam kelas, pembinaan melalui ekstra kurikuler, penataan suasana sekolah yang kondusif bagi pelaksanaan nilai-moral, bahkan keterlibatan masyarakat dalam pembinaan nilai-moral siswa. Atas dasar hal tersebut, lembaga pendidikan (sekolah) perlu lebih intensif membudayakan nilai-moral pada peserta didik, dan dilakukan sejak dini (Saepudin, 2005).

Sekolah Dasar (SD) merupakan jenjang pendidikan formal pertama yang membina siswa usia 7 sampai 12 tahun, usia yang cukup peka untuk meniru dan merespons terhadap stimulasi pendidikan dari luar. Oleh karena itu, pembudayaan nilai-moral yang tepat di SD memberikan dasar yang cukup kuat kebermanakluman siswa pada masa yang akan datang. Sebaliknya, kekeliruan metodologis dalam pendidikan nilai-moral di Sekolah Dasar akan berpengaruh negatif terhadap kehidupan moral individu masa selanjutnya. Atas dasar itulah penelitian ini diarahkan untuk mencari model pembudayaan nilai-moral di SD dengan meneliti secara khusus SD Negeri Bandungregosari 1 Kota Malang, Jawa Timur, baik yang dilakukan oleh Kepala Sekolah, Guru, dan Komite Sekolah maupun oleh orang-orang yang ada di lingkungan sekolah tersebut.

Tulisan ini mendeskripsikan model pembudayaan nilai-moral yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan TK (Taman Kanak-kanak) dan SD (Sekolah Dasar), selanjutnya mendeskripsikan dan menganalisis pola-pola pembinaan nilai-moral di SD lokasi penelitian; selanjutnya memformulasikan model yang holistik dalam pembudayaan nilai-moral di Sekolah Dasar.¹

PENDIDIKAN NILAI-MORAL DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF HISTORIS-YURIDIS

Secara historis konstitusional, pembudayaan nilai-moral melalui institusi pendidikan telah dimulai sejak 1945. Hal tersebut dapat dilihat dalam setiap rumusan tujuan pendidikan nasional. Seperti usulan BP KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) tanggal 29 Desember 1945 yang mengemukakan bahwa pendidikan dan pengajaran harus membimbing murid-murid menjadi warga negara yang mempunyai rasa tanggung jawab. Selanjutnya, Kementerian PP dan K (Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan) merumuskan bahwa mendidik warga negara sejati yang bersedia menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk negara dan masyarakat (Djojonegoro, 1996:26). Undang-Undang (UU) No.4 tahun 1950 Bab II Pasal 3 merumuskan perlunya: *“membentuk manusia susila yang tjakap dan warga negara yang demokratis, serta bertanggung djawab tentang kesedjahteraan masjarakat dan*

¹Tulisan ini merupakan rangkuman Disertasi Doktor yang saya pertahankan dalam Sidang Ujian Terbuka di Sekolah Pascasarjana UPI (Universitas Pendidikan Indonesia) di Bandung pada tanggal 20 Oktober 2010. Saya mengucapkan terima kasih kepada para Promotor (Prof. Dr. H. Endang Sumantri; Prof. H. A. Kosasih Djahiri; dan Prof. Dr. H. Sofyan Sauri) serta para Penguji Disertasi ini (terutama Prof. Dr. Haryo S. Martodirdjo dan Prof. Dr. H. Djudju Sudjana). Walau bagaimanapun, seluruh isi dan interpretasi tulisan ini berada sepenuhnya pada tanggung jawab akademik saya pribadi.

tanah air” (Kementerian PP dan K, 1951); dan dalam UU No.12 tahun 1954, yang dilengkapi dengan Keputusan Presiden RI No.145 tahun 1965, mengungkapkan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk *“melahirkan warga negara sosialis, yang bertanggung jawab atas terselenggaranya masyarakat sosialis Indonesia yang adil dan makmur, baik spirituil maupun materiil dan yang berdjiva Pantjasila”* (Kementerian PP dan K, 1955; dan Setneg RI, 1966). Kemudian, UU No.2 tahun 1989 merumuskan bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk *“mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya”*, yang ciri-cirinya dirinci menjadi *“beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, sehat jasmani dan rohani, berkepribadian mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan”* (Depdikbud RI, 1990).

Dan akhirnya, dalam UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) Bab II Pasal 3 dinyatakan sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab (Depdiknas RI, 2004).

Dengan demikian, nuansa nilai-moral senantiasa melekat dalam cita-cita pendidikan nasional; dan pendidikan nilai sudah mejadi bagian integral dari pendidikan nasional. Ditinjau secara historis kurikuler pula, ada sejumlah mata pelajaran yang secara khusus mengemban misi pendidikan nilai-moral, yakni Pendidikan Moral Pancasila dan Pendidikan Budi Pekerti.

Secara teoritis, hadirnya perundang-undangan dan mata pelajaran nilai-moral tersebut seharusnya berpengaruh terhadap kebermoralan masyarakat, terutama peserta didik. Namun dalam kehidupan sehari-hari, terdapat sejumlah ketimpangan sosial yang mengindikasikan *“ketidakbermoralan”*, seperti kebebasan mengeluarkan pendapat yang cenderung anarkis, terjadinya pelanggaran hukum di setiap lapisan masyarakat, pelaksanaan PILKADA (Pemilihan Kepala Daerah) yang cenderung berakhir dengan kerusuhan, kontrol sosial yang sering lepas tata-krama, serta terdegradasinya kewibawaan para pejabat negara (Hadiwardoyo, 1990; Setiardja, 1990; dan Darmadi, 2007).

Dalam konteks pendidikan, gejala melemahnya moralitas diperlihatkan dengan maraknya tawuran antar pelajar, siswa berada di pusat-pusat perbelanjaan dan hiburan pada saat jam belajar, percakapan dilakukan dengan kalimat yang tidak santun, berpakaian yang tidak sesuai dengan peraturan sekolah, menggunakan asesoris yang tidak pantas, datang terlambat ke sekolah, tidak menunjukkan rasa hormat kepada guru, dan bahkan melakukan hubungan seks pra-nikah (*Pikiran Rakyat*, 29/7/2005). Semua fenomena tersebut mengindikasikan belum berhasilnya pendidikan nilai-moral secara memuaskan, baik di persekolahan maupun di luar persekolahan.

Mengapa dampak instruksional dan dampak pengiring dari tujuan pendidikan nasional dan semua mata pelajaran pendidikan nilai-moral itu terkesan tidak mengakar? Berbagai penelitian, seperti dihimpun oleh A. Kosasih Djahiri *et al.* (1998:4), menunjukkan bahwa PMP (Pendidikan Moral Pancasila) atau PPKn (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan) atau Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila) cenderung menitikberatkan pada penguasaan aspek pengetahuan dan mengabaikan pengembangan sikap dan keterampilan kewarganegaraan, dengan menggunakan pendekatan ekspositori yang cenderung indoktrinatif (Darmodihardjo, 1979). Senada dengan itu, Udin S. Winataputra menyatakan sebagai berikut:

Baik mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn), atau sebelumnya Pendidikan Moral Pancasila (PMP), maupun dalam rangka Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila), pembudayaan nilai-moral terkesan lebih banyak diajarkan atau *tought* dan bukan dipelajari atau *learned* dengan peran guru / dosen / penatar / manggala yang lebih dominan. Sehingga situasi kelasnya pun lebih bersifat *dominative* dan bukan *integrative*. Dampak instruksional dan pengiringnya lebih bersifat pengetahuan atau *knowledge oriented*. Oleh karena itu dapat dipahami mengapa bangsa Indonesia dalam berbagai lapisan sosial terkesan belum mengamalkan nilai-nilai Pancasila (Winataputra, 2000:8).

Kontroversi antara idealitas moral dengan realitas sosial, baik di sekolah maupun di masyarakat, menandakan perlu ditingkatkannya pembudayaan nilai-moral secara integral melalui proses pendidikan, serta melalui proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Oleh karena itu pada tataran instrumental makro, *school-based values education* dan *society-based values education* menyarankan perlu dirancang pembudayaan nilai-moral secara sistemik dan utuh dalam sistem pendidikan nasional, dan secara praksis diciptakan jaringan serta iklim sosial-kultural yang memungkinkan terjadinya interaksi fungsional-pedagogis antara kegiatan-kegiatan di sekolah dan di luar sekolah (Durkheim, 1973; Fraenkel, 1977; CISED, 1999; dan Winataputra, 2000).

PENDIDIKAN SEBAGAI PROSES PEMBUDAYAAN NILAI-MORAL

Agar peserta didik terlibat dalam proses pembudayaan nilai-moral diperlukan adanya proses pembelajaran yang memfasilitasi pengalaman mereka untuk mengetahui nilai-moral, mempraktekan nilai-moral, dan terbiasa berbuat sesuai dengan aturan moral yang berlaku. Dalam kaitan ini, UNESCO (*United Nations for Education, Scientific and Cultural Organization*) mengusulkan empat pilar belajar, yaitu: "*learning to know, learning to do, learning to be, and learning to live together*" (UNESCO, 1996). Penerapan empat pilar tersebut, dalam proses pembelajaran, memungkinkan peserta didik menguasai cara memperoleh pengetahuan, berkesempatan menerapkan pengetahuan yang dipelajarinya, dan berkesempatan untuk berinteraksi secara aktif dengan sesama peserta didik sehingga dapat menemukan dirinya. Model pembelajaran seperti ini hanya

dapat berlangsung dengan tenaga guru yang penuh konsentrasi, peralatan yang memadai, materi yang terpilih, dan waktu yang cukup tanpa harus mengejar target ujian nasional.

Ada kesan kuat bahwa baik guru, orang tua, maupun murid selalu didorong untuk mengejar dan menghimpun informasi keilmuan sebanyak mungkin, namun melupakan aspek pendidikan yang fundamental, yaitu bagaimana menjalani hidup dengan terhormat. Ketika pendidikan tidak lagi menempatkan prinsip-prinsip moralitas agung sebagai basisnya, maka akan menghasilkan orang yang selalu mengejar materi dan pemenuhan tuntutan *physical happiness* yang durasinya hanya sesaat dan potensial membunuh nalar yang sehat dan nurani terdalam (Hidayat, 2003:2). Pendidikan yang sehat adalah yang secara sadar membantu anak didik bisa merasakan, menghayati, dan menghargai jenjang makna hidup dari yang bersifat fisik sampai yang estetikal, moral, dan spiritual (Bertens, 2000).

Jika pendidikan dipahami sebagai aksi kultural (pembudayaan), maka fungsinya tidak bisa dibatasi hanya pembelajaran di kelas saja. Ia harus diperluas perannya dalam menciptakan kehidupan publik yang lebih demokratis. Dengan demikian, harus ada kontekstualisasi pembelajaran di kelas. Teks yang diajarkan di kelas harus dihubungkan dengan kehidupan nyata. Dengan kata lain, harus ada dialektika antara teks dan konteks, teks dan realitas (Wincoff & Bufford, 1985; dan Gandal & Finn, 1992). Persoalannya adalah bagaimana melibatkan siswa SD (Sekolah Dasar) untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial sehingga dapat terlibat untuk mencari solusi terhadap problema yang ada di lingkungannya? Untuk menjawab hal tersebut diperlukan adanya pendidikan holistik yang mampu melibatkan seluruh potensi siswa dan lingkungan belajarnya.

Melihat situasi dan kondisi yang ada di lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah, maka patutlah kita menata dan merevitalisasi kembali model pendidikan dan kebudayaan nilai-moral yang selama ini berjalan. Dari pembelajaran yang cenderung indoktrinatif dan teoritis menuju ke arah kebudayaan yang lebih demokratis dan lebih berorientasi pada pengamalan dalam kehidupan sehari-hari melalui perubahan visi, misi, dan strategi pedagogis yang sesuai untuk pendidikan dan kebudayaan nilai-moral (Bahmuller, 1996).

Sampai sekarang tidak sedikit orang yang meyakini bahwa nilai itu berkembang dan dibina di sekitar keluarga, karena hubungan insani antara orang tua dengan anak di keluarga sangat dekat sehingga memungkinkan terjadinya pewarisan nilai yang intensif dalam setiap aktivitasnya, baik melalui sikap dan perbuatan maupun pemikiran (Raths *et al.*, 1978:16). Namun, menurut hasil penelitian Thomas Lickona (1991:33) ternyata bahwa orangtua hanya memiliki waktu rata-rata dua menit seharinya untuk berdialog secara bermakna dengan anaknya. Akibatnya, kembali menurut Louis Raths *et al.* (1978:17), kesempatan untuk mendiskusikan kegiatan-kegiatan harian yang

bermakna itu hilang. Akhirnya, anak akan menerima dan menginternalisasi nilai dari luar, salah satu di antaranya dari teman-teman sebaya.

Pergaulan dengan teman sebaya akan menambah pembendaharaan informasi, yang akhirnya akan memengaruhi berbagai jenis kepercayaan yang dimiliki oleh anak (Djiwandono, 2004:93). Kumpulan kepercayaan yang dimiliki oleh anak akan membentuk sikap yang dapat mendorong untuk memilih atau menolak sesuatu. Sikap-sikap yang mengkristal akan menjadi nilai, dan nilai tersebut akan berpengaruh pada perilaku anak. Informasi, sikap, dan kebiasaan teman sebaya sangat kuat pengaruhnya karena di antara mereka relatif lebih terbuka dan intensitas pergaulannya relatif sering, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kelompok sebaya mempunyai aturan main sendiri, dan anak cenderung menyesuaikan diri dengan aturan main tersebut dengan harapan agar diterima oleh kelompoknya. Jika nilai yang disampaikan teman sebaya tersebut negatif akan membiaskan internalisasi nilai-nilai luhur yang seharusnya mereka miliki.

Di samping itu, tokoh politik, selebritis, dan para pejabat publik merupakan salah satu bagian masyarakat yang dapat memengaruhi perilaku anak. Masing-masing figur dapat menawarkan nilai yang berbeda, bahkan tidak jarang perilaku yang diperlihatkan bertentangan dengan nilai-nilai luhur moralitas bangsa. Persoalan ini menambah kebingungan anak. Kebingungan anak terhadap nilai, diperluas dengan derasnyanya arus informasi dari media komunikasi.

Pada akhir abad ke-20, alat-alat komunikasi yang potensial telah diperkenalkan ke dalam ritualitas kehidupan keluarga (Bloch, 1986). Jika nilai memang mewakili cara pandang terhadap kehidupan, atau memberi arahan kehidupan, serta membuat perubahan dalam hidup, tentu setiap orang berharap adanya perhatian khusus terhadap perkembangan nilai anak-anak (Sumartana, 1994). Oleh karena itu, selayaknya media komunikasi mutakhir mengembangkan pandangan hidup yang sama sehingga memberikan stabilitas nilai pada anak. Namun, media memberikan variasi pandangan hidup yang tidak pernah ditemuinya di keluarga, sehingga membiaskan pandangan hidup yang seharusnya mereka warisi. Dewasa ini, media sering menggunakan prinsip "*bad issues is good news*", sementara semua orang menonton, menyimak, dan mencernanya. Dalam konteks ini Stanley Cohen (1972:16) dan Keith Tester (2003:14) dengan tegas menyatakan bahwa media telah lama sebagai agen kejahatan moral.

Peningkatan kriminalitas dan menurunnya moralitas ini mulai menyentuh anak-anak usia Sekolah Dasar (SD). Mereka ada yang terlibat dalam kasus NARKOBA (Narkotika dan Obat Berbahaya Adiktif), tindakan kekerasan antar teman, seksualitas, dan bahkan sampai dengan kasus pembunuhan. Persoalan ini perlu mendapat perhatian khusus dari para pakar pendidikan, khususnya pakar pendidikan nilai-moral, sebab merupakan indikasi bahwa pelaksanaan pembelajaran pendidikan nilai-moral di sekolah belum memenuhi

harapan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Padahal sedikitnya ada empat peran moral persekolahan, yaitu: (1) sebagai pengembang potensi moral atau teori perkembangan kognitif; (2) sebagai pewaris nilai-moral sosial atau teori *social learning*; (3) sebagai idealitas kehidupan moral masyarakat atau teori keteladanan; dan (4) sebagai laboratorium moralitas siswa atau teori *just community school* (Winataputra, 1999a dan 1999b; CCE, 2000; dan CICED, 2000).

Pembudayaan nilai-moral harus dilakukan secara dini, dan usia SD (Sekolah Dasar) merupakan periode kehidupan yang sangat penting untuk pembinaan moralitas individu. Dalam praktek pendidikan nasional, SD merupakan jenjang pendidikan formal pertama yang akan menentukan arah pengembangan potensi peserta didik. Oleh karena itu, kekeliruan metodologis dalam pendidikan nilai-moral di Sekolah Dasar akan berdampak panjang pada kehidupan moral individu. Dalam konteks ini D. Purpel dan K. Ryan (1976), W. Puspoprodjo (1999), Kama Abdul Hakam (2000), dan Abdullah (2005) menyatakan bahwa kegagalan pendidikan nilai (agama dan moral) karena sekolah masih terbatas pada penyampaian *moral knowing* dan *moral training* tapi tidak menyentuh *moral being*, yaitu membiasakan anak untuk terus-menerus melakukan perbuatan moral. Agar tercipta *moral being* siswa tentu dibutuhkan suasana kelas dan sekolah yang kondusif agar nilai-moral tersebut teraplikasikan. Tugas seperti itu menuntut sekolah untuk menjadi lembaga pembudayaan nilai-moral, bukan hanya sebagai lembaga pengajaran moral dan lembaga pelatihan moral (Simon, Rath & Herminn, 1978; dan Kohlberg, 1981 dan 1984).

Berdasarkan deskripsi di atas dapat ditekankan kembali bahwa: (1) Dilihat dari yuridis formal dan instrumen kurikuler, negara memandang penting adanya pembinaan nilai-moral melalui pendidikan; (2) Masyarakat menuntut institusi persekolahan untuk berperan aktif dalam membina dan mengembangkan nilai-moral peserta didik secara sistematis dan terprogram; serta (3) Sekolah Dasar merupakan institusi persekolahan pertama yang memiliki peran untuk membina fondasi keilmuan dan moralitas peserta didik. Atas dasar itulah perlu penelitian serius tentang model pembudayaan nilai-moral pada persekolahan, khususnya pada jenjang SD (Sekolah Dasar), dengan harapan dapat menemukan model alternatif ideal tentang pembudayaan nilai-moral di SD.

RUMUSAN MASALAH, TUJUAN, DAN MANFAAT PENELITIAN

Atas dasar latar belakang di atas, diperlukan adanya upaya lembaga pendidikan, khususnya Sekolah Dasar, untuk membina dan mengembangkan moralitas siswa sehingga mereka memahami nilai-moral, mampu melaksanakan nilai-moral, serta terbiasa melaksanakan nilai-moral itu dalam kehidupan sehari-hari. Untuk mewujudkan upaya tersebut diperlukan adanya model pembudayaan nilai-moral di Sekolah Dasar.

Oleh karena itu, rumusan masalah penelitian ini diformulasikan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: (1) Bagaimanakah bentuk model rujukan pembudayaan nilai-moral di Sekolah Dasar?; (2) Bagaimanakah realitas model pembudayaan nilai-moral di Sekolah Dasar Negeri Bandungregjosari 1 Kota Malang, Jawa Timur?; (3) Upaya apa yang dilakukan oleh Kepala Sekolah dalam menata suasana dan kultur sekolah dalam rangka pembudayaan nilai-moral di Sekolah Dasar Negeri Bandungregjosari 1 Kota Malang?; (4) Bagaimanakah model pengintegrasian nilai-moral pada mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum Sekolah Dasar?; (5) Kegiatan apakah yang efektif digunakan oleh tenaga kependidikan dalam pembudayaan nilai-moral di Sekolah Dasar?; (6) Bagaimanakah keterlibatan warga sekolah, yaitu guru, tata usaha, komite sekolah, dan tenaga kependidikan lainnya dalam mendukung pembudayaan nilai-moral di Sekolah Dasar Negeri Bandungregjosari 1 Kota Malang?; serta (7) Bagaimanakah model integratif dalam pembudayaan nilai-moral di Sekolah Dasar?

Produk akhir penelitian ini adalah tersusunnya model integratif dalam pembudayaan nilai-moral untuk siswa SD. Untuk mencapai hasil tersebut diperlukan adanya data-data pendukung sebagai berikut: (1) Kerangka acuan model pembudayaan nilai-moral yang menjadi rujukan Sekolah Dasar; (2) Realitas pembudayaan nilai-moral yang terjadi di Sekolah Dasar Negeri Bandungregjosari 1 Kota Malang; (3) Aktivitas Kepala Sekolah dalam membangun suasana sekolah untuk membudayakan nilai-moral di Sekolah Dasar Negeri Bandungregjosari 1 Kota Malang; (4) Bentuk-bentuk pengintegrasian nilai-moral yang dilakukan oleh guru pada mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum Sekolah Dasar Negeri Bandungregjosari 1 Kota Malang; (5) Kegiatan-kegiatan yang dijadikan wahana pembudayaan nilai-moral di Sekolah Dasar; serta (6) Aktivitas tenaga kependidikan dalam mendukung pembudayaan nilai-moral di Sekolah Dasar Negeri Bandungregjosari 1 Kota Malang.

Data-data tersebut, setelah dideskripsikan dan dianalisis, selanjutnya diformulasikan untuk menyusun model integratif dalam pembudayaan nilai-moral di Sekolah Dasar.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis bagi dunia pendidikan dalam membina dan mengembangkan moralitas siswa, khususnya pada jenjang Sekolah Dasar. Secara rinci penelitian ini diharapkan bermanfaat:

Pertama, secara khusus dapat memberikan gambaran tentang kondisi objektif pembudayaan nilai-moral di Sekolah Dasar Negeri Bandungregjosari 1 Kota Malang serta menjadi rujukan para praktisi pendidikan di lingkungan sekolah dalam melakukan proses pembudayaan nilai-moral kepada siswa.

Kedua, pada tataran teoritis dapat memberikan kontribusi dalam mengkonstruksi model pembelajaran nilai-moral integratif di institusi persekolahan, baik dalam pembinaan kematangan pertimbangan moral dan internalisasi moral sosial maupun dalam pembinaan perilaku moral siswa.

Ketiga, memberikan kontribusi bagi pengembangan dunia pendidikan pada umumnya dan pendidikan secara institusional pada khususnya sebagai sebuah kelembagaan pendidikan yang memiliki peranan strategis dalam melakukan proses pembudayaan nilai-moral pada generasi muda bangsa.

Keempat, dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para *stakeholders* pendidikan, khususnya pemegang kebijakan dalam merumuskan program yang lebih tepat demi optimalnya membangun karakter bangsa yang beradab.

Kelima, dapat dijadikan penelitian awal dan rujukan ilmiah untuk mengembangkan model pembudayaan nilai-moral di sekolah yang lebih komprehensif dan aplikabel.

METODE, LOKASI, DAN SUBJEK PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *mode of inquiry qualitative interactive*, yaitu studi yang mendalam dengan menggunakan teknik pengumpulan data langsung dari orang dalam lingkungan alamiahnya (Sukmadinata, 2008:61). Peneliti menginterpretasikan fenomena serta mencari makna daripadanya. Peneliti membuat suatu gambaran yang kompleks dan menyeluruh dengan deskripsi detil dari kacamata para informan. Peneliti interaktif mendeskripsikan konteks dari fenomena dan secara berkelanjutan merevisi pertanyaan berdasarkan pengalaman lapangan.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif-analitik dengan variasi studi kasus. Metode deskriptif-analitik merupakan metode penelitian yang menekankan kepada usaha untuk memperoleh informasi mengenai status atau gejala pada saat penelitian, memberikan gambaran terhadap fenomena-fenomena, juga lebih jauh menerangkan hubungan, serta menarik makna dari suatu masalah yang diinginkan (McMillan & Schumacher, 2001). Dalam konteks ini Nana Syaodih Sukmadinata mengungkapkan bahwa penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang paling mendasar dan ditujukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah ataupun rekayasa manusia (Sukmadinata, 2008:72). Adapun studi kasus (*case study*) merupakan metode untuk menghimpun dan menganalisis data berkenaan dengan sesuatu kasus. Studi kasus merupakan suatu penelitian yang dilakukan terhadap suatu "kesatuan sistem". Kesatuan ini dapat berupa program, kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terikat oleh tempat, waktu, atau ikatan tertentu.

Oleh karena metode yang digunakan adalah metode deskriptif, maka dalam penelitian ini tidak menggunakan hipotesis yang dirumuskan di awal untuk diuji kebenarannya. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto bahwa pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non hipotesis. Kalaupun dalam perjalanannya terdapat hipotesis, ia mencuat sebagai bagian dari upaya untuk membangun dan mengembangkan teori berdasarkan data lapangan atau *grounded theory* (Arikunto, 1998:245).

Sementara itu, pendekatan kualitatif-interaktif sengaja dipilih karena penulis menganggap bahwa karakteristiknya sangat cocok dengan masalah yang menjadi fokus penelitian (Alwasilah, 2002; dan Moleong, 2007).

Adapun lokasi penelitian adalah di Sekolah Dasar (SD) Negeri Bandungrejosari 1 yang beralamat di Jalan S. Supriyadi No.179 Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur. Sedangkan subjek penelitiannya adalah warga sekolah yang terdiri atas Kepala Sekolah, Komite Sekolah, Guru, Tata Usaha, dan Siswa.

Adapun alasan penulis menetapkan SDN Bandungrejosari 1 sebagai objek penelitian karena SD tersebut menjadi rintisan sekolah berstandar nasional, juara I lomba gugus tingkat Jawa Timur tahun 2008, dan juara lomba gugus tingkat nasional pada tahun 2007 dan 2008 yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional. Indikator yang menjadikannya “juara” adalah: (1) dikarenakan unggul dalam urusan administratif; (2) ketersediaan tenaga pengajar yang profesional; (3) kelengkapan ruang kelas, sarana, dan prasarana pendukung kegiatan belajar-mengajar seperti laboratorium bahasa, laboratorium komputer, perpustakaan, dan lain-lain; (4) manajemen keuangan yang transparan; serta (5) adanya program kurikuler dan ekstrakurikuler yang baik.

Melalui penelitian ini penulis ingin melakukan studi lebih mendalam tentang prestasi yang diperoleh oleh SD tersebut dalam hubungannya dengan pembinaan moralitas siswa, khususnya melalui kultur pendidikan di sekolah tersebut.

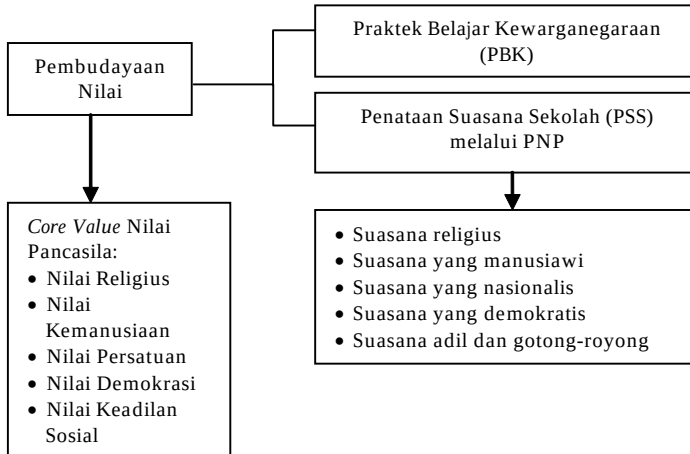
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari kajian yang telah dilakukan, paling tidak ada 7 (tujuh) temuan penting dalam penelitian ini, yang penjelasannya dan pembahasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, **tentang model rujukan serta model realitas pembudayaan nilai-moral yang dikembangkan di SD Negeri Bandungrejosari 1 Kota Malang.** Model pembudayaan nilai yang dikembangkan oleh Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia intinya mengacu kepada dua pendekatan, yakni: (1) pembudayaan nilai-moral Pancasila melalui Penataan Suasana Sekolah atau PSS, yaitu menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada para peserta didik dengan jalan menciptakan suasana yang memungkinkan nilai-nilai tersebut diaplikasikan dalam kehidupan persekolahan; dan (2) pembudayaan nilai-moral Pancasila melalui Praktek Belajar Kewarganegaraan atau PBK, yaitu merancang kegiatan belajar-mengajar PKn atau Pendidikan Kewarganegaraan yang memungkinkan peserta didik mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam proses pembelajaran.

Adapun nilai dasar yang dipesankan dalam kerangka acuan tersebut adalah nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila adalah nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang merupakan penjabaran sila-sila, yaitu nilai-nilai Ketuhanan / nilai religius,

nilai kemanusiaan, nilai persatuan / nilai kebangsaan, nilai kerakyatan / nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial / nilai kebersamaan. Perhatikan bagan di bawah ini:



Bagan 1:

Model Pembudayaan Nilai di Sekolah versi Direktorat Pembinaan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia

Pendekatan PBK (Praktek Belajar Kewarganegaraan) berkaitan dengan mata pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan). Hal tersebut dilandasi oleh pemikiran bahwa penyelenggaraan pendidikan di Indonesia diarahkan pada pembentukan Manusia Indonesia Seutuhnya (MIS) yang berkualitas, yakni manusia yang beriman dan taqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, kreatif, inovatif, dan bertanggungjawab terhadap pembangunan bangsa (Megawangi, 2005). Hal ini selaras dengan keberadaan PKn, yaitu mata pelajaran yang digunakan sebagai wahana pengembangan dan pelestarian nilai-nilai luhur dan moral yang berakar pada budaya bangsa Indonesia. Nilai-nilai moral yang luhur tersebut diharapkan dapat diwujudkan dalam bentuk perilaku sehari-hari siswa, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat dan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

Mata pelajaran PKn memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter sebagaimana diamanatkan oleh Pancasila dan UUD (Undang-Undang Dasar) 1945. Secara lebih rinci, mata pelajaran PKn bertujuan agar siswa memiliki kemampuan: (1) Berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu-isu kewarganegaraan; (2) Berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab, dan bertindak cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,

serta anti-korupsi; (3) Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya; (4) Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (Winataputra, 1999c; dan Depdiknas, 2007).

Sementara itu kerangka acuan program pembudayaan nilai Pancasila melalui mata pelajaran PKn difokuskan pada: (1) Pengembangan strategi inovasi pembelajaran di kelas dalam pendidikan nilai; (2) Memberikan bekal pengetahuan tentang nilai-norma dan moral Pancasila bagi siswa sehingga mampu mengekspresikan diri sebagai subjek belajar, masyarakat belajar, dan warganegara dalam menatap kehidupan masyarakat yang pluralis-multikultural di sekolahnya; (3) Membangun wawasan berpikir tentang berbagai permasalahan nilai di negaranya; dan (4) Mampu mengelola informasi dan teknologi untuk bekerjasama dan berkolaborasi sehingga setiap konflik dipecahkan secara demokratis-kolaboratif dan religius serta mengandalkan kemampuan empati tinggi, bukan bersifat etnosentris dan primordialistis (Depdiknas, 2007).

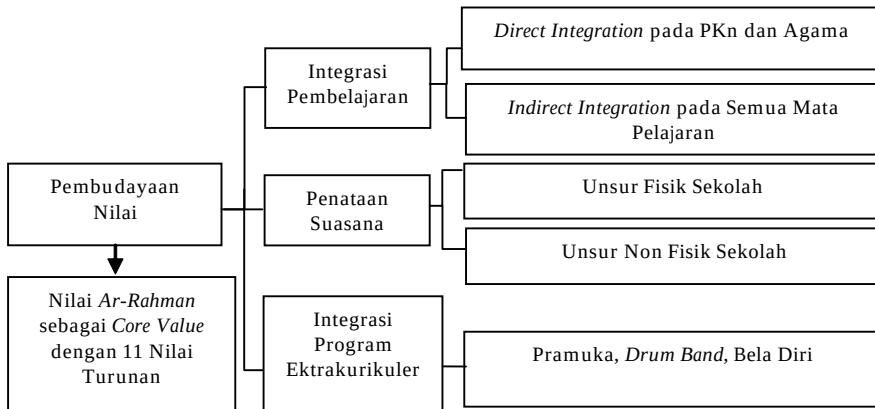
Merujuk kepada kerangka acuan yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan Nasional diketahui bahwa PBK (Praktek Belajar Kewarganegaraan) merupakan alih bahasa dari *Project Citizen* yang diimplementasikan dalam bentuk *portfolio based learning* (Budimansyah, 2002). Dalam tataran implementasi, pembudayaan nilai melalui pembelajaran PKn tercermin dalam rumusan Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) hasil rancangan guru yang sarat dengan muatan nilai-nilai religius, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial.

Pendekatan selanjutnya yang berhubungan dengan penataan kultur sekolah. Kultur sekolah adalah kultur organisasi dalam konteks persekolahan. Kultur sekolah adalah kualitas kehidupan sekolah yang tumbuh dan berkembang berdasarkan spirit dan nilai-nilai tertentu yang dianut oleh sekolah. Kualitas kehidupan sekolah tertampilkan dalam kerja Guru, Kepala Sekolah, dan tenaga kependidikan, serta hubungan di antara mereka, termasuk siswanya (Comb, 1978). Adapun model pembudayaan nilai melalui penataan suasana sekolah adalah dengan cara memfasilitasi lingkungan sekolah sehingga kondusif agar nilai-nilai Pancasila dapat diaplikasikan oleh warga sekolah (Depdiknas, 2001b).

Pendekatan penataan suasana sekolah didasari oleh pemikiran bahwa idealnya setiap sekolah memiliki *spirit* dan *nilai* tertentu. Spirit dan nilai tersebut menjwai serta mewarnai pembuatan struktur organisasi sekolah, deskripsi tugas, sistem dan prosedur kerja, kebijakan dan aturan sekolah, tata-tertib sekolah, hubungan vertikal dan horizontal antar warga sekolah, serta acara ritual dan seremonial sekolah, yang lambat-laun akan membentuk kualitas kehidupan fisiologis maupun psikologis sekolah sehingga membentuk perilaku warga sekolah.

Pengembangan kultur sekolah dapat dilakukan melalui: (1) *Tataran Pengembangan Nilai atau Spirit*, yaitu mengidentifikasi berbagai nilai atau spirit yang dapat dijadikan landasan; (2) *Tataran Teknis*, yaitu mengembangkan nilai dan spirit pada berbagai prosedur kerja manajemen atau *management work procedures*, sarana manajemen atau *management toolkit*, dan kebiasaan kerja atau *management work habits*; serta (3) *Tataran Sosial*, yaitu proses implementasi dan institusionalisasi tentang bagaimana seluruh kebijakan dan aturan teknis yang dikembangkan oleh sekolah berdasarkan pada spirit / nilai tertentu yang disosialisasikan, diamalkan, dan secara kontinyu diinstitusionalisasikan sehingga menjadi kebiasaan atau *habits* di sekolah dan di luar sekolah.

Adapun model realitas yang dikembangkan oleh Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 1 di Kota Malang, Jawa Timur, dapat dilihat pada bagan berikut ini:



Bagan 2:

Model Pembudayaan Nilai-Moral di Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 1 di Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia.

Core value yang menjadi dasar pembudayaan nilai-moral di sekolah adalah *Ar-Rahman* dengan 11 nilai turunannya, yaitu: (1) Ketaqwaan, (2) Keamanan, (3) Ketertiban, (4) Keindahan, (5) Kebersihan, (6) Kekeluargaan, (7) Kerindangan, (8) Kesehatan, (9) Keterbukaan, (10) Keteladanan, dan (11) Kewirausahaan. *Ar-Rahman* disepakati sebagai *core value* karena setara dengan cinta kasih yang sama-sama dipegang oleh umat Kristiani. Adapun implementasi model dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu: (1) pendekatan integrasi pembelajaran, (2) penataan suasana sekolah, dan (3) integrasi program ekstra kurikuler.

Mengenai pendekatan yang berkaitan dengan praktek pembelajaran dijelaskan bahwa dalam setiap rapat perumusan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) awal tahun ajaran. Kepala Sekolah selalu memberikan

arahan tentang pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai moral, baik itu yang bersumber dari agama maupun dari falsafah bangsa, Pancasila, dalam praktek pembelajaran yang dilaksanakan. Namun dalam prakteknya, guru hanya mengintegrasikan secara langsung (*direct integration*) nilai-nilai moral agama dan nilai-nilai moral Pancasila pada mata pelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) dan pendidikan agama, baik itu agama Islam maupun agama Kristen.

Sementara untuk mata pelajaran lain diintegrasikan secara tidak langsung (*indirect integration*), biasanya dilakukan ketika membuka dan menutup kegiatan pembelajaran, pokok bahasan tertentu yang sangat beririsan dengan nilai-moral, serta ketika memberikan arahan kepada siswa yang melakukan pelanggaran di kelas. Dengan kata lain, guru mata pelajaran di luar PKn dan Agama tidak secara tersurat mencantumkan nilai-nilai moral dalam silabus dan RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) yang dirancangnya, nilai-nilai moral hanya menjadi dampak tidak langsung (*nurturant effect*) bagi mata pelajaran di luar PKn dan Agama. Walaupun terdapat beberapa kelemahan seperti sikap dan perilaku guru yang terkadang tidak mengejawantahkan pesan-pesan moral yang ditanamkan kepada siswa atau terjadi inkonsistensi pada sikap dan perilaku guru sehingga menjadikan biasanya nilai-moral yang ditanamkan kepada siswa.

Mengenai pendekatan yang berhubungan dengan penataan suasana sekolah dijelaskan bahwa hal tersebut dapat dikelompokkan menjadi penataan unsur fisik dan penataan unsur non fisik. Secara fisik, sekolah di SD Negeri Bandungrejosari 1 sangat kondusif untuk melakukan pembudayaan nilai-moral kepada siswa. Hal itu tercermin dalam penataan halaman sekolah yang hijau, sarana dan prasarana belajar yang memadai, fasilitas laboratorium yang lengkap, fasilitas ibadah, penataan kelas yang kondusif, sarana kebersihan, kelengkapan sarana pendukung di setiap ruangan yang memadai, serta pembuatan pesan-pesan moral yang terpampang di setiap dinding kelas dan ruangan yang ada. Sedangkan penataan unsur non fisik meliputi perumusan visi, misi, program, dan tata-tertib sekolah yang secara operasional dijabarkan lagi dalam visi, misi, program, dan tata-tertib kelas, serta masing-masing unit yang ada di sekolah seperti ekstra kurikuler, perpustakaan, dan UKS (Usaha Kesehatan Sekolah). Hal tersebut secara terencana memasukan muatan nilai-moral dalam setiap rumusan yang ditetapkan. Proses sosialisasi dan transformasinya dilakukan dalam setiap pertemuan dan dipampang di tempat-tempat yang mudah diakses oleh warga sekolah. Seperti visi dan misi dipasang di dinding tempat parkir, di majalah dinding di depan kelas, dan di setiap ruangan yang ada di sekolah. Demikian juga halnya dengan tata-tertib sekolah dan tata-tertib kelas, semuanya dipampang di dinding depan kelas sehingga memungkinkan bagi setiap warga sekolah untuk membacanya.

Mengenai pendekatan dengan memanfaatkan program ekstra kurikuler yang ada di sekolah dapat dijelaskan bahwa terdapat tujuh program ekstrakurikuler

kurikuler), yaitu pramuka (*praja muda karana*), karawitan, seni lukis, bela diri, *drum band*, komputer, dan seni tari. Dari tujuh program ekstrakurikuler tersebut, terdapat tiga program yang dalam tataran perencanaan dan praktek pembinaannya syarat dengan nilai-moral, yaitu pramuka, bela diri, dan *drum band*.

Kedua, tentang upaya Kepala Sekolah dalam menata suasana (kultur) sekolah untuk membudayaan nilai-moral di SD Negeri Bandungrejosari 1 di Kota Malang, Jawa Timur. Kepala Sekolah selalu membuat program pengembangan sekolah. Setiap awal tahun pelajaran direvisi dan dikomunikasikan kepada semua warga sekolah, termasuk wali murid melalui Komite Sekolah dan Paguyuban Wali Murid. Penataan suasana sekolah yang diprogramkan mengacu kepada unsur fisik dan non fisik. Kepala Sekolah berperan sebagai perencana, pengarah, fasilitator, pengembang, serta kontroling dan evaluasi program penataan kedua unsur tersebut (BSNP, 2007).

Penataan unsur fisik meliputi pembangunan kembali ruangan yang diperlukan sehingga representatif, pemetaan tata-letak ruang kelas, ruang guru, ruang kepala sekolah, ruang tata-usaha, ruang perpustakaan, ruang ekstra kurikuler, laboratorium, mushola, toilet, arena parkir, lapangan upacara, gedung pusat sumber belajar, taman sekolah, taman kelas, serta pembuatan pesan-pesan moral yang terbuat dari papan artistik dan dipasang di tempat-tempat strategis yang bisa dilihat dengan mudah oleh semua warga sekolah.

Penataan unsur fisik dikerjasamakan dengan *stakeholder* seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan orang tua melalui Komite Sekolah dan Paguyuban Wali Murid. Selain itu melibatkan semua warga sekolah seperti guru dan penjaga sekolah. Dalam penataan taman sekolah, setiap guru harus memiliki bunga atau pohon asuh yang diletakkan di sekitar lingkungan sekolah, setiap guru kelas harus merumuskan program penataan fisik kelas setiap awal tahun pelajaran dan implementasinya dikerjasamakan dengan paguyuban wali murid kelas masing-masing. Penataan dan perawatan sarana fisik kelas melibatkan guru kelas dan pengurus paguyuban wali murid kelas masing-masing, sehingga menjadi media dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta menciptakan tanggung jawab kolektif antara warga sekolah dan warga masyarakat dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif.

Penataan unsur non fisik dimulai dari perumusan visi, misi, dan program sekolah, menetapkan tata-tertib sekolah dan tata-tertib kelas, penetapan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), program pembinaan kompetensi dan mentalitas guru, tata usaha, penjaga perpustakaan, pembinaan ekstra kurikuler, penjaga sekolah, dan petugas SATPAM (Satuan Pengamanan) yang dilakukan setiap minggu serta memanfaatkan kegiatan Ramadhan, Idul Adha, peringatan HUT (Hari Ulang Tahun) kemerdekaan Indonesia, peringatan HARDIKNAS (Hari Pendidikan Nasional), upacara bendera, olahraga bersama, dan kenaikan kelas.

Program Kepala Sekolah yang tersusun secara rinci dan berjenjang dimulai dari program awal tahun ajaran, program mingguan, program

bulanan, program harian, hingga program menjelang akhir tahun ajaran di dikomunikasikan kepada warga sekolah melalui rapat dinas dan dipasang dalam papan yang representatif di ruang tunggu Kepala Sekolah dan ruang guru, sehingga semua warga sekolah dapat mengetahui dan memungkinkan berjalannya kontrol sosial.

Khusus dalam membina siswa yang melanggar tata-tertib dan melakukan perbuatan immoral, dilakukan pembinaan intensif secara berjenjang yang dimulai oleh guru kelas, guru BP (Bimbingan dan Penyuluhan) hingga Kepala Sekolah secara langsung. Selain itu, melibatkan wali murid melalui Paguyuban Wali Murid jika penanganan oleh pihak-pihak internal sekolah tidak terselesaikan. Bahkan untuk kasus berat bisa melibatkan tokoh masyarakat, petugas kepolisian, sampai petugas kejaksaan.

Dalam menegakan tata-tertib sekolah melibatkan *stakeholder*, terutama wali murid dan masyarakat sekitar sekolah. Momentum bulan Ramadhan, shalat Idul Adha, dan peringatan hari besar nasional (PHBN) merupakan momentum strategis sebagai media membangun kebersamaan antara warga sekolah dengan masyarakat serta momentum efektif dalam mendorong pembudayaan nilai-moral di lingkungan sekolah. Kebersamaan antara warga sekolah dengan warga masyarakat, khususnya wali murid, melalui gerak jalan bersama, menyembelih hewan kurban, dan tablig akbar pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW (*Salallahu 'Alaihi Wassalam*) dikembangkan agar perwujudan manajemen berbasis masyarakat dapat terealisasi dan tanggung jawab pengembangan sekolah dapat tumbuh di masyarakat (Tholkhah, 2008).

Dalam melakukan pembinaan terhadap guru, Kepala Sekolah menggunakan pendekatan-pendekatan keagamaan, diantaranya melalui pemberian pesan-pesan moral pada saat rapat untuk mengarahkan warga sekolah secara keseluruhan, melakukan kunjungan ke setiap kelas untuk memastikan setiap guru masuk kelas, dan menyiapkan sarana fisik kelas yang sarat dengan pesan-pesan moral, serta koordinasi kasus per kasus untuk menyelesaikan pelanggaran moral yang dilakukan oleh siswa.

Ketiga, tentang pengintegrasian nilai-moral pada mata pelajaran yang terdapat dalam struktur kurikulum SD Negeri Bandongrejosari 1 Kota Malang. Ketika penyusunan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) pada awal tahun pelajaran, Kepala Sekolah menghimbau kepada para guru agar mengintegrasikan nilai-moral dalam perencanaan dan praktek pembelajaran. Namun, Kepala Sekolah tidak menegaskan agar proses integrasi nilai-moral tersebut secara tersurat terencana dalam perangkat pembelajaran guru, baik itu silabus maupun rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP). Kepala Sekolah juga tidak setuju jika terdapat satu mata pelajaran khusus yang mengajarkan nilai-moral, budi pekerti, atau akhlak mulia; ia menilai bahwa pembudayaan nilai-moral harus menjadi tanggung jawab bersama seluruh guru dan warga sekolah.

Dalam prakteknya hanya guru PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) dan guru Agama yang secara khusus mengintegrasikan nilai-moral ke dalam

perencanaan pembelajaran, baik silabus maupun RPP. Adapun guru lain hanya menjadikan materi nilai-moral sebagai pengayaan dan *hidden curriculum* yang pelaksanaannya sangat ditentukan oleh konteks materi dan kondisi tertentu.

Pengintegrasian nilai-moral dalam mata pelajaran PKn dan Pendidikan Agama dimulai sejak guru merumuskan silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Unsur-unsur yang ada di dalamnya menandakan adanya nuansa nilai-moral. Dimulai dari perumusan tujuan, materi, metode, media, sampai kepada proses evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan, baik itu evaluasi proses maupun evaluasi hasil (Soedijarto, 2004). Khusus dalam mata pelajaran Agama, muatan nilai-moral yang diintegrasikan lebih spesifik kepada nilai-moral yang bersumber dari ajaran agama, baik itu agama Islam bagi siswa Muslim maupun agama Kristen bagi siswa yang beragama Kristen. Selain dalam mata pelajaran PKn dan Agama, nilai-moral menjadi program khusus yang secara tersurat terencanakan dalam program guru Bimbingan dan Konseling (BK).

Keempat, tentang upaya warga sekolah dalam membudayakan nilai-moral di Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 1 Kota Malang. Warga sekolah terlibat sejak perencanaan program pembudayaan nilai-moral sampai proses evaluasi implementasi program-program tersebut. Guru lebih banyak terlibat di dalam kelas. Para guru berupaya untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan menyisipkan pesan-pesan moral dan menciptakan suasana kelas yang kondusif bagi pembudayaan nilai-moral di kalangan siswa. Adapun di luar kelas, guru memberikan masukan program penataan kultur sekolah ketika rapat, menjadi ibu asuh pohon atau bunga yang ada di taman sekolah, menegakan tata-tertib sekolah dan tata-tertib kelas, membimbing siswa dalam program olahraga bersama, shalat dzuhur berjamaah, upacara bendera, pesantren Ramadhan, serta kegiatan yang berhubungan dengan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI) dan Peringatan Hari Besar Nasional (PHBN). Khusus guru PKn, guru Agama, dan guru BK secara tersurat mengintegrasikan nilai-moral dalam perencanaan dan praktek pembelajaran.

Komite Sekolah terlibat dalam pembudayaan nilai-moral dengan cara merumuskan program kerjanya secara berkelanjutan. Program kerja Komite Sekolah SD (Sekolah Dasar) Negeri Bandungrejosari I secara umum terbagi menjadi tiga, yaitu: (1) program pertimbangan, (2) program pendukung, serta (3) program pengontrol dan mediasi. Pada intinya, Komite Sekolah mendukung dan berperan aktif dalam melaksanakan program sekolah dalam pembudayaan nilai-moral di sekolah, serta mengkomunikasikan kepada orang tua untuk menciptakan suasana yang kondusif agar pembudayaan nilai-moral berjalan dengan baik

Pembina ekstra kurikuler, khususnya pembina Pramuka (*Praja Muda Karana*), bela diri, dan *drum band* sangat strategis dijadikan sebagai fasilitator pembudayaan nilai-moral kepada siswa. Hal tersebut akan menjadi efektif jika dibina oleh seorang pembina yang profesional, memiliki integritas, komitmen yang tinggi, serta memiliki kemampuan dalam membuat program

yang tepat. Program pembinaan ekstra kurikuler Pramuka merupakan salah satu ekstra kurikuler yang sarat dengan nilai-moral kepada siswa, diantaranya nilai kedisiplinan, kebersamaan, menghargai orang lain, kejujuran, integritas, kesetiakawanan, patriotisme, dan sebagainya.

Pembina ekstra kurikuler menggunakan upacara yang dilakukan hari Senin menjadi salah satu instrumen untuk mengarahkan siswa dalam membiasakan pelaksanaan nilai-moral. Hal tersebut dilakukan dengan membiasakan upacara tepat waktu, siswa yang terlambat diberi sanksi, tertib dalam berbaris, belajar menghargai pembina upacara yang sedang memberi pesan-pesan moral, belajar berbagi tugas, belajar memimpin, dan sebagainya.

Kelima, tentang kegiatan-kegiatan yang dijadikan wahana pembudayaan nilai-moral di Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 1. Kegiatan yang efektif untuk melakukan pembinaan nilai moral di SD (Sekolah Dasar) Bandungrejosari 1 adalah: (1) *Pramuka*, kegiatan ini dilakukan secara rutin setiap hari Sabtu. Kegiatan ini mengajarkan dan membiasakan siswa untuk berdisiplin, tanggungjawab, kerjasama, tolong-menolong, dan menghormati sesama; (2) *Drum band*, kegiatan ini merupakan favorit siswa yang dapat menanamkan rasa percaya diri, berdisiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan patuh terhadap pimpinan; (3) *Usaha Kesehatan Sekolah* atau UKS, kegiatan ini dipadukan dengan kegiatan Palang Merah Remaja atau PMR. Sesuai dengan kapasitasnya, siswa belajar menolong yang sakit di sekolah dan merawatnya. Kegiatan ini menumbuhkan sikap empati, menolong sesama, serta meringankan beban orang lain; (4) *Bela diri*, kegiatan ini memupuk rasa percaya diri, tidak boleh sombong, suka menolong orang lain, dan disiplin; (5) *Shalat berjamaah*, kegiatan ini dapat membina nilai ketakwaan, kedisiplinan, kebersihan, dan ketertiban; (6) *Upacara*, baik upacara rutin setiap hari Senin, upacara Perayaan Hari Besar Nasional, maupun upacara Perayaan Hari Besar Islam. Nilai-moral yang ditanamkan adalah disiplin, tanggungjawab, kerjasama, tolong-menolong, ketakwaan, dan menghormati orang lain; serta (7) *Pesantren kilat*, kegiatan ini dilakukan pada bulan Ramadhan bagi siswa yang beragama Islam. Kegiatan ini dapat memupuk sikap empati, toleran, menghormati orang lain, tolong-menolong, disiplin, dan ketakwaan

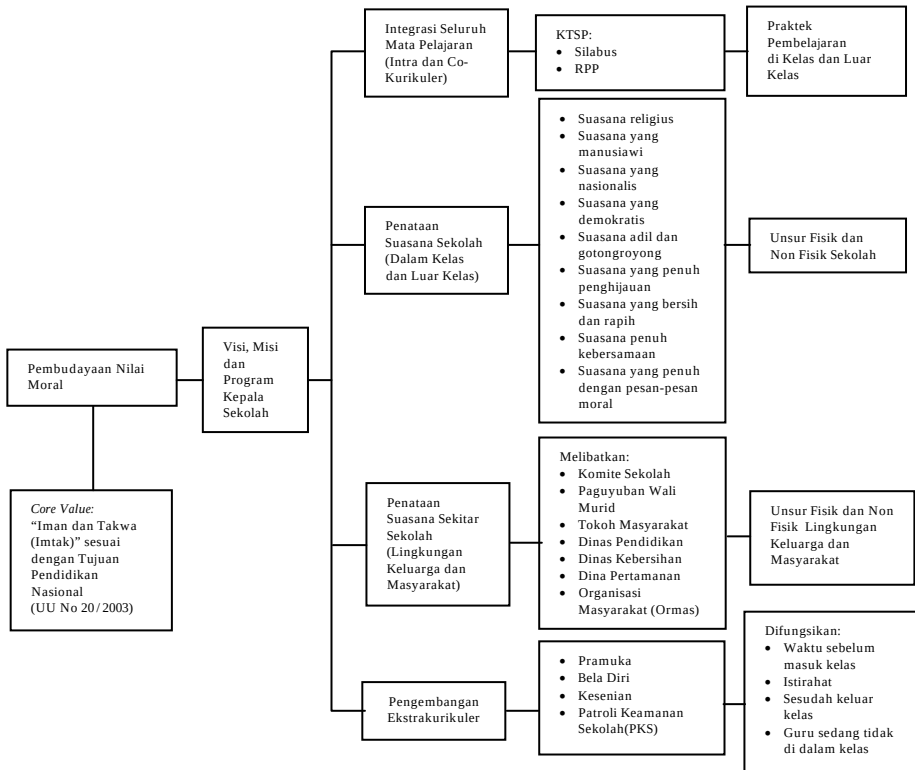
Keenam, tentang pelanggaran moral yang umum terjadi di Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosari 1 dan upaya penanganannya. Bentuk sikap dan perbuatan immoral yang terjadi di sekolah diantaranya tidak mengerjakan Pekerjaan Rumah (PR), menyontek ketika ujian, *malak* adik kelasnya, mencuri makanan di kantin sekolah, mencuri buku dari perpustakaan, berkelahi dengan teman sekelasnya, sampai coba-coba membeli minum-minuman keras yang dilakukan oleh siswa kelas VI.

Penanganannya ada yang bersifat mencegah dan ada pula yang sifatnya mengobati. Upaya mencegah atau preventif dilakukan sejak Penerimaan Siswa Baru (PSB) dimana semua siswa baru harus menandatangani kesediaan untuk mentaati tata-tertib sekolah di atas materai. Sedangkan penanganan

pelanggaran moral dilakukan secara berjenjang dimulai oleh guru kelas, guru BP (Bimbingan dan Penyuluhan), Kepala Sekolah, wali murid (Paguyuban Wali Murid), petugas SATPAM (Satuan Pengamanan), hingga petugas kepolisian dan kejaksaan.

Perbuatan immoral umumnya dilakukan oleh siswa pada saat guru sedang keluar kelas, pada saat istirahat, waktu sebelum jam masuk, dan waktu jam pulang. Perbuatan immoral siswa dipengaruhi oleh faktor ekonomi orang tua, faktor kesibukan orang tua di rumah, faktor orang tua yang tidak rukun, faktor lemahnya kontrol dari guru, dan faktor lingkungan pergaulan di luar sekolah.

Ketujuh, tentang model hipotetik pembudayaan nilai-moral di Sekolah Dasar. Berdasarkan model rujukan, dihubungkan model realitas yang dikembangkan oleh Sekolah Dasar Negeri Bandungrejosasri 1, dikembangkan model yang lebih komprehensif. Adapun model alternatif hipotetik tersebut dapat digambarkan dalam bentuk bagan sebagai berikut:



Bagan 3:
Model Alternatif Hipotetik Pembudayaan Nilai-Moral di Lingkungan Sekolah

Tujuan pendidikan nasional, sebagaimana termaktub dalam UU (Undang-Undang) No.20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) bab II pasal 3, menekankan pentingnya pembinaan keimanan dan ketaqwaan peserta didik. Hal ini mengisyaratkan adanya *core value* dalam pembangunan karakter dan moral bangsa yang bersumber pada keyakinan beragama (Kniker, 1977). Artinya, semua proses pendidikan harus bermuara pada penguatan nilai-nilai ketuhanan, sesuai dengan keyakinan agama masing-masing.

Dalam pada itu, mengenai rancangan program Kepala Sekolah dalam proses pembudayaan nilai-moral dapat diwujudkan dengan menggunakan 4 (empat) pendekatan, yang penjelasannya adalah sebagai berikut:

Pertama, Pendekatan integrasi dalam seluruh mata pelajaran. Nilai-nilai moral dapat diintegrasikan dalam seluruh mata pelajaran. Untuk mewujudkannya perlu pendidikan dan pelatihan serta pendampingan secara berkesinambungan kepada guru untuk mengintegrasikan nilai-moral ke dalam rancangan pembelajaran, apakah Silabus maupun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) sehingga nilai-moral secara tersurat terencanakan dalam seluruh komponen pembelajaran (tujuan, materi, metode, media, sumber, dan evaluasi) pada semua mata pelajaran. Berbagai pendekatan pendidikan nilai perlu dikuasai oleh mereka yang memiliki kemampuan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi pendidikan nilai-moral di dalam dan di luar kelas.

Kedua, Pendekatan penataan suasana sekolah. Rancangan penataan suasana sekolah yang terdapat dalam kerangka acuan dari Departemen Pendidikan Nasional serta penataan suasana sekolah yang berkembang di SD (Sekolah Dasar) Negeri Bandungrejosari 1 sangat strategis jika dipadukan sehingga menghasilkan suasana sekolah yang lebih kondusif bagi proses pembudayaan nilai-moral. Hal yang perlu dikembangkan dari keduanya adalah tentang indikator suasana sekolah yang kondusif, diantaranya adalah pembentukan suasana sekolah yang berorientasi kepada pembentukan suasana yang religius, suasana yang manusiawi, suasana yang nasionalis, suasana yang demokratis, suasana yang adil dan gotong-royong, suasana yang penuh penghijauan, suasana yang bersih dan rapih, suasana yang penuh dengan pesan-pesan moral, serta suasana yang penuh kebersamaan dan keterbukaan. Implikasi dari penataan suasana sekolah tersebut dapat diwujudkan melalui penataan unsur fisik dan non fisik yang ada di dalam lingkungan sekolah.

Ketiga, Pendekatan penataan suasana sekitar sekolah. Penataan suasana lingkungan di luar sekolah diperlukan karena adanya hubungan yang sinergis antara kehidupan di sekolah dengan di luar sekolah dan sebaliknya. Pembinaan nilai-moral diperlukan adanya kerjasama positif antara *stakeholders* di dalam dan di luar sekolah, karena pengaruh positif dan negatif penataan unsur fisik dan non fisik di dalam dan di luar sekolah selalu berpengaruh pada lingkungan keduanya.

Keempat, Pendekatan pengembangan program ekstra kurikuler.

Program ekstra kurikuler yang dikembangkan di SD (Sekolah Dasar) Negeri Bandungrejosari I di Kota Malang, khususnya kegiatan Pramuka (*Praja Muda Karana*), bela diri, dan *drum band* bisa menjadi referensi bagi sekolah lain dalam pembudayaan nilai-moral. Namun, pelanggaran moral lebih banyak dilakukan oleh siswa pada waktu sebelum masuk kelas, waktu istirahat, sesudah keluar kelas, dan ketika guru kelas sedang keluar kelas. Oleh karena itu diperlukan adanya kegiatan ekstra kurikuler lain seperti Patroli Keamanan Sekolah (PKS) yang dapat difungsikan untuk membantu mengontrol dan mengarahkan kegiatan siswa pada waktu-waktu tertentu seperti berikut: (1) Waktu sebelum masuk kelas, (2) Waktu istirahat, (3) Sesudah keluar kelas, dan (4) Waktu guru sedang tidak di dalam kelas

Agar pembudayaan nilai-moral melalui pengembangan program ekstra kurikuler dapat berjalan sesuai dengan visi, misi, dan program sekolah, maka Kepala Sekolah perlu merumuskan kerangka acuan kerja pembinaan bagi masing-masing ekskul (ekstra kurikuler) yang dikembangkan. Adapun kerangka acuan kerja pembinaan tersebut minimal berisikan tentang *Standard Operational Procedure* (SOP) pembinaan, nilai-nilai dasar yang wajib dikembangkan, dan kurikulum pembinaan sehingga arah pembinaan dan pengembangan setiap ekskul mengarah kepada visi, misi, program, dan *core value* yang menjadi *way of life* dan budaya sekolah.

KESIMPULAN

Kerangka acuan pembudayaan nilai Pancasila dari Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan Nasional dijadikan salah satu rujukan pembudayaan nilai-moral di SDN (Sekolah Dasar Negeri) Bandungrejosari 1 di Kota Malang, Jawa Timur. Kerangka acuan tersebut menggunakan dua pendekatan, yaitu: (1) Praktek Belajar Kewarganegaraan atau PBK melalui mata pelajaran PKn atau Pendidikan Kewarganegaraan; dan (2) Penataan Suasana Sekolah atau PSS melalui PNP atau Pembelajaran Nilai Pancasila dengan *core values* nilai-nilai Pancasila (Depdiknas, 2008).

Model pembudayaan nilai-moral yang dikembangkan SD Negeri Bandungrejosari 1 menggunakan tiga pendekatan, yakni: (1) Pendekatan integrasi dalam mata pelajaran atau *direct integration* PKn dan Agama, serta *indirect integration* pada mata pelajaran lainnya; (2) Pendekatan melalui penataan suasana sekolah, baik unsur fisik maupun non fisik; dan (3) Pendekatan integrasi pembudayaan nilai-moral melalui program ekstra kurikuler seperti kegiatan Pramuka, *drum band*, dan bela diri. Adapun *core value* yang mejadi dasar pijakannya adalah “Ar-Rahman” dengan 11 nilai turunannya.

Upaya Kepala Sekolah menata suasana dan kultur sekolah dalam rangka pembudayaan nilai-moral di SD Negeri Bandungrejosari 1 Kota Malang adalah dengan cara membaca model rujukan dan mengembangkan model mandiri

melalui pelibatan semua warga sekolah dan warga masyarakat, terutama Komite Sekolah dan Paguyuban Wali Murid. Kepala Sekolah memanfaatkan momentum rapat perumusan KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan) setiap awal tahun ajaran, rapat evaluasi mingguan, momentum kegiatan bulan Ramadhan, kegiatan Idul Adha, kegiatan HARDIKNAS (Hari Pendidikan Nasional), olah raga bersama setiap hari Jum'at, kunjungan harian ke setiap kelas dan unit organisasi yang ada, serta media-media fisik yang mudah di akses oleh warga sekolah sebagai instrumen dalam proses perumusan, sosialisasi, pelaksanaan, dan evaluasi pembudayaan nilai-moral di lingkungan sekolah.

Upaya mengintegrasikan nilai-moral secara langsung dalam komponen pembelajaran (tujuan, materi, metode, media, sumber, dan evaluasi) hanya dilakukan oleh guru PKn (Pendidikan Kewarganegaraan) dan guru Agama (Islam dan Kristen). Sedangkan dalam mata pelajaran lain dilakukan secara spontan sesuai dengan situasi, kondisi, dan materi tertentu (Depdiknas, 2001a).

Semua warga sekolah (guru, tata usaha, komite sekolah, pembina ekstra kurikuler, penjaga perpustakaan, penjaga kantin, petugas satuan keamanan, dan paguyuban wali murid) ikut dilibatkan dalam merumuskan dan mengimplementasikan pembudayaan nilai-moral di sekolah dengan Kepala Sekolah sebagai fasilitator dalam proses perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan evaluasi pembudayaan nilai-moral. Adapun warga sekolah berkontribusi sesuai dengan tugas, wewenang, dan wilayah kerjanya masing-masing.

Kegiatan yang efektif digunakan untuk pembudayaan nilai-moral di Sekolah Dasar adalah Pramuka (*Praja Muda Karana*), UKS (Usha Kesehatan Sekolah), bela diri, upacara hari Senin, peringatan Hari Besar Agama dan Hari Besar Nasional, *drum band*, serta pelaksanaan ibadah bersama.

Bentuk sikap dan perbuatan immoral yang umum terjadi di sekolah diantaranya adalah tidak mengerjakan pekerjaan rumah, *nyontek* ketika ulangan, *malak* adik kelas, mencuri makanan di kantin sekolah, mencuri buku dari perpustakaan, berkelahi dengan teman sekelasnya, sampai coba-coba membeli minum-minuman keras yang dilakukan oleh siswa kelas VI. Penanganan dilakukan secara hierarkis, dimulai dari Guru Kelas, Guru BP (Bimbingan dan Penyuluhan), Kepala Sekolah, hingga Paguyuban Wali Murid, dan Komite Sekolah. Upaya preventif dilakukan sejak penerimaan siswa baru dengan menandatangani pernyataan tentang kesediaan mentaati tata-tertib sekolah dan tata-tertib kelas.

Model alternatif hipotetik yang dapat dikembangkan dalam pembudayaan nilai-moral di sekolah merupakan produk kajian terhadap model rujukan dan analisis empiris terhadap model pembudayaan nilai-moral yang dipraktekkan di SD (Sekolah Dasar) Negeri Bandungrejosari 1. Model alternatif tersebut secara umum berorientasi kepada empat pendekatan, yakni: (1) Pendekatan

integrasi langsung ke dalam semua mata pelajaran; (2) Pendekatan penataan suasana sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas; (3) Pendekatan penataan suasana sekitar sekolah, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat; serta (4) Pendekatan pengembangan ekstra kurikuler seperti Pramuka, *Drum Band*, Bela Diri, dan Patroli Keamanan Sekolah atau PKS. Khususnya PKS dan Pramuka dilibatkan dalam mengontrol kegiatan siswa pada saat sebelum masuk kelas, waktu istirahat, dan sesudah keluar kelas.

IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Pembudayaan nilai-moral di Sekolah Dasar membutuhkan program terpadu sejak perumusan visi, misi, serta kebijakan sekolah yang diselenggarakan secara simultan melalui integrasi terhadap seluruh komponen pembelajaran, penataan suasana sekolah baik fisik dan non-fisik di dalam kelas dan lingkungan sekolah, pengembangan kegiatan kurikuler, co-kurikuler dan ekstra kurikuler, serta adanya tindakan yang sinergis antara sekolah dengan lingkungan masyarakat.

Pengembangan pembudayaan nilai-moral di Sekolah Dasar perlu dilakukan sejak pengorganisasian kurikulum, pengembangan materi bahan ajar, pengelolaan kelas dan lingkungan sekolah, serta pembinaan secara sistemik terhadap seluruh *stakeholders* kependidikan, sehingga ada kesatuan program, langkah, dan tindakan yang saling mendukung antara kegiatan di dalam kelas, di lingkungan sekolah, serta lingkungan sekitar sekolah.

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia hendaknya melakukan proses pendampingan dan evaluasi berkelanjutan atas kerangka acuan yang telah dikembangkan, sehingga Kepala Sekolah memiliki pengetahuan dan keterampilan yang utuh tentang acuan tersebut serta dapat mengembangkan model mandiri yang lebih komprehensif.

Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten / Kota setempat hendaknya juga merancang program-program yang dapat memicu spirit warga sekolah untuk melakukan proses pembudayaan nilai-moral di lingkungan sekolah serta mendorong warga masyarakat untuk terlibat dalam proses tersebut.

Kepala Sekolah hendaknya merancang program-program peningkatan empat kompetensi utama guru (pedagogik, kepribadian, profesional, dan sosial) yang berbasis pendidikan nilai (Boediono *et al.*, 2001). Pemberian pelatihan khusus kepada guru tentang pendekatan-pendekatan dalam pendidikan nilai serta strategi integrasi nilai-moral ke dalam rancangan pembelajaran, baik Silabus maupun RPP (Rencana Pelaksanaan Pembelajaran) menjadi salah satu kebutuhan mendasar yang perlu difasilitasi oleh Kepala Sekolah melalui forum MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) atau organisasi gugus di Sekolah Dasar.

Guru hendaknya memiliki integritas yang tinggi dalam melakukan fungsi-fungsinya, sehingga ia bukan sekedar pandai dalam melakukan *transformation*

of knowledge melainkan juga mampu melakukan *transformation of value* serta mampu memberikan keteladanan sikap dan perilaku sehari-hari di depan siswa. Perilaku spontan guru atau perilaku alamiahlah yang terkadang lebih berdampak terhadap pembentukan sikap dan perilaku siswa.

Pelanggaran-pelanggaran moral yang dilakukan oleh siswa lebih banyak pada saat siswa di luar kelas (sebelum masuk kelas, waktu istirahat, dan sesudah keluar kelas). Oleh karena itu, tugas guru bukan hanya di dalam kelas (Proses Belajar-Mengajar atau PBM), melainkan juga sepanjang siswa berada di dalam lingkungan sekolah, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pemanfaatan teknologi CCTV dapat menjadi alternatif yang dapat membantu proses pengontrolan kegiatan guru dan siswa pada saat sebelum masuk kelas, waktu istirahat, ketika guru tidak ada di kelas, dan sesudah keluar kelas.

Keberadaan bangunan sekolah hendaknya terbebas dari segala pengaruh lingkungan eksternal yang negatif, sehingga proses pembudayaan nilai-moral di dalam sekolah dapat berjalan dengan optimal. Praktek pendidikan dengan pola *boarding school* sangat efektif untuk memproteksi segala pengaruh negatif dari luar yang dapat mencederai proses pembudayaan nilai-moral di dalam lingkungan sekolah.

Hasil penelitian tentang pengembangan model pembudayaan nilai-moral di sekolah ini masih terbuka untuk ditindaklanjuti, sehingga dapat diperoleh dan dikembangkan temuan-temuan baru yang lebih kontekstual dan dapat digeneralisasikan.

Bibliografi

- Abdul Hakam, Kama. (2000). *Pendidikan Nilai*. Bandung: Value Press.
- Abdullah. (2005). "Implementasi Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dalam Meningkatkan Perilaku Nilai-Moral Siswa". *Disetasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Bandung: Program Studi Pendidikan Umum / Nilai, Sekolah Pascasarjana UPI [Universitas Pendidikan Indonesia].
- Alwasilah, A. Chaedar. (2002). *Pokoknya Kualitatif: Dasar-dasar Merancang dan Melakukan Penelitian Kualitatif*. Bandung: Kiblat Buku Utama dan Pustaka Jaya.
- Arikunto, Suharsimi. (1998). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bahmuller, C.E. (1996). *The Future of Democracy and Education for Democracy*. Calabasas: CCE [Center for Civic Education].
- Bertens, K. (2000). *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, cetakan ke-5.
- Budimansyah, Dasim. (2002). *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Genesindo.
- Bloch, Eric. (1986). *Scientific and Technology Literacy: The Need and the Challenge*. Baltimore, MD: Free Press.
- Boediono *et al.* (2001). *Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Balitbang Depdiknas RI [Badan Penelitian dan Pengembangan, Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia].
- BSNP [Badan Standar Nasional Pendidikan]. (2007). *Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No.13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah*. Jakarta: BSNP.

- CCE [Center for Civic Education]. (2000). *An International Framework for Education in Democracy*. Calabasas: Free Press.
- CICED [Center for Indonesian Civic Education]. (1999). *Workshop on the Development of Content and Paradigm of Civic Education for Schools: Conclusions*. Bandung: CICED.
- CICED [Center for Indonesian Civic Education]. (2000). *A Need-Assessment for New Indonesian Civic Education: A National Survey Final Report*. Bandung: CICED.
- Cohen, Stanley. (1972). *Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers*. London: McGibbon & Kee.
- Comb, Arthur W. (1978). "Affective Education or None at All" dalam *Values Education Journal*, 4(2), hlm.25-40.
- Darmadi, Hamid. (2007). *Dasar-dasar Konsep Pendidikan Moral*. Bandung: Alfabeta.
- Darmodihardjo, Dardji. (1979). *Pancasila: Suatu Orientasi Singkat*. Jakarta: PN Balai Pustaka, cetakan ke-8.
- Depdikbud RI [Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia]. (1990). *Undang-Undang No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Depdikbud RI.
- Depdiknas RI [Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia]. (2004). *Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS)*. Jakarta: Depdiknas RI.
- Depdiknas [Departemen Pendidikan Nasional]. (2001a). *Pedoman Pendidikan Budi Pekerti pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah: Buku I*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas [Departemen Pendidikan Nasional]. (2001b). *Pedoman Penciptaan Suasana Sekolah yang Kondusif dalam Rangka Pembudayaan Budi Pekerti Luhur bagi Warga Sekolah: Buku II*. Jakarta: Depdiknas.
- Depdiknas [Departemen Pendidikan Nasional]. (2007). *Kerangka Acuan Pembudayaan Nilai Pancasila Melalui Pembelajaran PKn (Pendidikan Kewarganegaraan)*. Jakarta: Depdiknas RI [Republik Indonesia].
- Depdiknas [Departemen Pendidikan Nasional]. (2008). *Penataan Suasana Sekolah Melalui PNP*. Jakarta: Depdiknas.
- Djahiri, A. Kosasih et al. (1998). *Analisis Temuan Penelitian Pandangan Guru PPKN SLTP dan SMU Negeri di Jawa Barat serta Implementasinya terhadap Pembaharuan Kurikulum PPKn 1994*. Bandung: Lab PPKN IKIP [Laboratorium Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan] Bandung.
- Djiwandono, Sri Esti Wuryani. (2004). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Penerbit Grasindo.
- Djojonegoro, Wardiman. (1996). *Limapuluh Tahun Pendidikan Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Durkheim, Emile. (1973). *Moral Education*. New York and Mac Millan: The Pree Press.
- Fraenkel, Jack R. (1977). *How to Teach about Values: An Analytical Approach*. New Jersey: Prentice Hall, Inc.
- Gandal, J.E. & E.S. Finn. (1992). *Education for Democracy*. Calabasas: CCE [Center for Civic Education].
- Hadiwardoyo, Purwa. (1990). *Moral dan Masalahnya*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Hidayat, Komaruddin. (2003). *Yang Terlewatkan dalam Pendidikan*. Jakarta: Pembina SBI [Sekolah Berwawasan Internasional] Madania. Juga tersedia dalam <http://www.kompas.com/kompas-cetak/0502/03/opini/1538957.htm> [diakses di Bandung, Indonesia: 28 Oktober 2011].
- Kementerian PP dan K [Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan]. (1951). *Undang-Undang No.4 Tahun 1950*. Djakarta: Kementerian PP dan K.
- Kementerian PP dan K [Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan]. (1955). *Undang-Undang No.12 Tahun 1954*. Djakarta: Kementerian PP dan K.
- Kniker, Charles K. (1977). *You and Values Education*. Columbus, Ohio: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Kohlberg, Lawrence. (1981). *Essay on Moral Development: The Philosophy of Moral Development*, Volume I. San Fransisco: Harper & Row Publisher.
- Kohlberg, Lawrence. (1984). *Essay on Moral Development: The Psychology of Moral Development*, Volume II. San Fransisco: Harper & Row Publisher.
- Lickona, Thomas. (1991). *Educating for Character: How Our Schools Can Teach Respect and Responsibility?* New York: Bantam Books.

- McMillan, James H. & J.C. Schumacher. (2001). *Research in Education: A Conceptual Introduction*. New York: Addison Wesley Longman, Inc., fifth edition.
- Megawangi, Ratna. (2005). *Membangun SDM Indonesia Melalui Pendidikan Holistik Berbasis Karakter*. Jakarta: Direktorat Pembinaan TK dan SD [Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar].
- Moleong, Lexy J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, edisi revisi.
- Pikiran Rakyat* [surat kabar]. Bandung: 29 Juli 2005.
- Purpel, D. & K. Ryan. (1976). *Moral Education: It Comes with the Territory*. Barkeley, California: McCulchan Publishing.
- Puspoprodjo, W. (1999). *Filsafat Moral: Kesusilaan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Grafika.
- Raths, Louis *et al.* (1978). *Values and Teaching: Working with Values in the Classroom*. Columbus, USA: Charles E. Merrill Publishing Company.
- Saepudin, Edi. (2005). "Pendidikan Nilai-Moral Terpadu dalam Pembentukan Perilaku Anak Prasekolah". *Disertasi Doktor Tidak Diterbitkan*. Bandung: Program Studi Pendidikan Umum / Nilai SPs UPI [Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia].
- Setiardi, Gunawan A. (1990). *Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Setneg RI [Sekretariat Negara Republik Indonesia]. (1966). *Keputusan Presiden RI No.145 Tahun 1965*. Jakarta: Setneg RI.
- Simon, S.B., L. Rath & M. Herminn. (1978). *Values Clarification: A Handbook of Practical Strategies for Teacher and Student*. New York: Dodd, Mead & Company.
- Soedijarto. (2004). *Kurikulum, Sistem Evaluasi, dan Tenaga Pendidikan sebagai Unsur Strategis dalam Penyelenggaraan Sistem Pengajaran Nasional*. Jakarta: Penerbit UNJ [Universitas Negeri Jakarta].
- Sukmadinata, Nana Syaodih. (2008). *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: UPI [Universitas Pendidikan Indonesia] dan Rosda Karya.
- Sumartana. (1994). "Keluarga dan Perubahan Masyarakat" dalam surat kabar *Kompas*. Jakarta: 25 Maret.
- Tester, Keith. (2003). *Media, Budaya, dan Moralitas*. Yogyakarta: Penerbit Juxtapose.
- Tholkhah, Imam. (2008). *Menciptakan Budaya Beragama di Sekolah*. Jakarta: Al-Ghazali Center.
- UNESCO [United Nations for Education, Scientific and Cultural Organization]. (1996). *International Commision on Education for the Twenty First Century*. Bangkok, Thailand: UNESCO.
- Winataputra, Udin S. (1999a). *Civic Education Classroom as a Laboratory for Democracy*. Bandung: CISED.
- Winataputra, Udin S. (1999b). *Profilling the Citizen of the Future and the Proficiencies Required for the New Age: An Indonesian Case*. Bangkok, Thailand: UNESCO-ACEID.
- Winataputra, Udin S. (1999c). *Perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan di Indonesia*. Bandung: CISED.
- Winataputra, Udin S. (2000). *Pendidikan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia sebagai Wahana Demokratisasi: Perspektif Metodologi*. Jakarta: Penerbit UT [Universitas Terbuka].
- Winecoff, Herbert L. & C. Bufford. (1985). *Towards Improved Instruction: A Curriculum Development Handbook for Instructional School*. New York: AISA.